

**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE
AUDIT TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS***
(Studi Empiris pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

AGATHA GALUH PEMBAYUN
NIM.C2C008006

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS*

(Studi Empiris pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

AGATHA GALUH PEMBAYUN
NIM.C2C008006

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Agatha Galuh Pembayun

Nomor Induk Mahasiswa : C2C008006

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE
AUDIT TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS***

Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Indira Januarti, Msi, Akt

Semarang, 5 Juni 2012

Dosen Pembimbing,


Dra. Hj. Indira Januarti, Msi, Akt

NIP.19640101 1992022001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

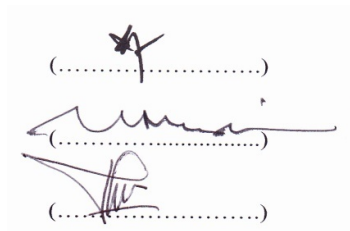
Nama Mahasiswa : Agatha Galuh Pembayun
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008006
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE**
AUDIT TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS*

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 19 Juni 2012

Tim Penguji

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir M.Si, Akt, Ph.D
2. Daljono, S.E., M.Si., Akt
3. Dra. Hj. Indira Januarti, Msi, Akt



(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Agatha Galuh Pembayun, menyatakan bahwa skripsi dengan judul :**Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Financial Distress***, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 5 Juni 2012

Yang membuat pernyataan,



(Agatha Galuh Pembayun)

NIM. C2C008006

ABSTRACT

This study investigates the impact audit committee characteristics on financial distress. The audit committee characteristics that use in this study are size of audit committee, independence of audit committee, frequency of audit committee meeting, and competence of audit committee. This study use one control variable is firm size.

The data being used is from public company which is listed in BEI in 2007-2010 period. Data collecting method which used in this research is method purposive sampling, that based on criteria which has been determined before. Based on the method purposive sampling, research sample total is 152 companies. Financial distress criteria is measure by cumulative negative earnings over any two years period. Hypothesis in this research are tested by logistic regression analytical method. Data analysis using logistic regression with SPSS 16.

The result show that size of audit committee and competence of audit committee has negative affect with financial distress. Independence of audit committee and frequency of audit committee meeting has not negative affect with financial distress

Keyword: financial distress, audit committee, cumulative negative earnings over any two years period

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik komite audit terhadap kesulitan keuangan. Karakteristik komite audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, komite audit independen, frekuensi pertemuan komite audit dan kompetensi komite audit. Penelitian ini menggunakan satu variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan.

Data yang digunakan adalah data perusahaan publik yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode *purposive sampling*, total sampel penelitian adalah 152 perusahaan. Hipotesis di dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode analisis regresi logistik. Kriteria *financial distress* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan metode laba negatif dua tahun berturut-turut. Analisis data menggunakan regresi logistik dengan bantuan SPSS 16.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran komite audit dan kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Komite audit independen dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Kata kunci: *financial distress*, komite audit, *laba bersih negatif dua tahun -turut*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"I don't care if you are black, white, straight, bisexual, gay, lesbian, short, tall, fat, skinny, rich or poor. If you are nice to me, I will be nice to you. Simple as that"

(Eminem)

"Bahagia itu kita yang ciptain, bukan mereka"

(Vino G Bastian)

"I always feel happy. You know why? Because I don't expect anything from anyone"

(Shakespeare)

"Penentu masa depan adalah diri sendiri, berdirilah diatas kaki mu sendiri dan ciptakan duniamu"

(Ibu)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ♠ *My Savior Jesus Christ and Saint Mary*
- ♠ *Keluargaku yang selalu memberikan doa dan support*
- ♠ *Sahabat-sahabat yang telah memberikan inspirasi*
- ♠ *Teman-teman seperjuangan akuntansi 2008*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Financial Distress***” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir M.Si, Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Ibu Indira Januarti, S.E., M.Si, Akt., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, nasehat, dukungan, bimbingan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Much. Syafrudin M.Si, Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Bapak Pujiharto, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam studi.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis.
6. Ayah dan Ibu tersayang, terimakasih untuk doa, dukungan, kasih sayang dan cintanya yang tak pernah lekang oleh waktu. Semoga penulis dapat membalas semuanya dengan menjadi anak yang berbakti dan membanggakan bagi kalian.
7. Adik-adik ku Regina Galuh Kinanti, Clara Galuh Utpala, Bernadeta Galuh Narwastu terimakasih telah menjadi nice sisters sekaligus menjadi teman di kala susah ataupun senang.
8. Sahabat-sahabatku Tensib, Leony, Viva, Ajeng, Ria, Allan, Lala, Caca, Astri, Nadia. Semoga persahabatan yang kita sebut dengan persaudaraan ini selalu tinggal dihati kita.
9. Stefanus D Angga W, terimakasih untuk semua yang ada, pernah ada, dan tak pernah ada.
10. Prasetyo Hadi S, yang telah menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik.
11. Teman-teman sepermainan di kala SMA, Kapal karam: Oline, Shylvi, Vega. Teman untuk bersandar. Belajar bukan untuk pelajaran, tapi belajar untuk menyikapi hidup, Nice. Kapal elite: Witun, Deshynta, Intan, Dindong yang mengajarkan hidup itu harus modal.
12. Sahabat ku Nyak' e , Iil, ko Robie. hidup wiraswasta..jual, jadi bos untuk diri sendiri itu nyaman.

13. Teman-teman KKN Desa Sidoharjo, Semarang. Ita, Miftah, Sheila, Mella, Putra, Dicky, Andri, Reza, ko Yang, dan Ruli. Terimakasih telah menjadi teman yang baik dalam 35 hari dan sampai sekarang.
14. Mbak Vina, Mas Cicuk dan Kakak Keanu, yang sudah seperti keluarga di rumah durian.
15. Seluruh teman-teman seperjuangan akuntansi 2008. Terima kasih atas seluruh dukungan dan bantuan selama menjalani proses perkuliahan ini.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
17. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat digunakan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Semarang, 5 Juni 2012

Penulis,



(Agatha Galuh Pembayun)

NIM. C2C008006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KLULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	
2.1.1. Teori Keagenan(Agency Theory)	12
2.1.2. <i>Financial Distress</i>	14
2.1.3. <i>Corporate Governance</i>	18
2.1.4. Komite Audit.....	21
2.1.4.1 Peran dan Tanggung Jawab Komit Audit	22
2.1.4.2 Komite Audit yang Efektif	25
2.1.4.3 Struktur Komite Audit	26
2.1.4.4 Karakteristik Komite Audit.....	28

2.1.4.5 Ukuran Komite Audit.....	29
2.1.4.6 Komite Audit Independen	30
2.1.4.7 Pertemuan Komite Audit	30
2.1.4.8 Kompetensi Komite Audit	32
2.2. Penelitian Terdahulu	33
2.3. Kerangka Pemikiran.....	43
2.4. Pengembangan Hipotesis	44
2.4.1 Ukuran Komite Audit dan <i>Financial Distress</i>	45
2.4.2 Komite Audit Independen dan <i>Financial Distress</i>	46
2.4.3 Frekuensi Pertemuan Komite Audit dan <i>Financial Distress</i>	48
2.4.4 Kompetensi Komite Audit dan <i>Financial Distress</i>	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
3.1 Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional.....	51
3.1.1 Variabl terikat (<i>Dependent Variable</i>).....	51
3.1.2 Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	52
3.1.2.1 Ukuran Komite Audit	52
3.1.2.2 Komite Audit Independen.....	52
3.1.2.3 Frekuensi Pertemuan Komit Audit.....	52
3.1.2.4 Kompetensi Komite Audit	53
3.1.3 Variabel Kontrol	54
3.1.4 Ukuran Perusahaan.....	54
3.2 Populasi dan Sampel	55
3.3 Jenis dan Sumber Data	57
3.4 Metode Pengumpulan data	57
3.5 Metode Analisis Data	58
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	58
3.5.2 Pengujian Hipotesis.....	58
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	63
4.1 Deskriptif Objek Penelitian	63
4.2 Analisis Data.....	63

4.2.1 Statistik Deskriptif	63
4.2.2 Uji Kelayakan Model (<i>Goodness of fit test</i>)	68
4.2.3 Uji Kelayakan Keseluruhan Model (<i>Overall Fit Model Test</i>)	69
4.2.3.1 <i>Chi Square Test</i>	69
4.2.3.2 <i>Cox and Snell R Square dan Nagelkerke R Square</i>	70
4.2.3.3 Matriks Klasifikasi	71
4.2.4 Uji Multikolinieritas	72
4.3 Uji Hipotesis	74
4.3.1 Pengaruh ACSIZE terhadap <i>Financial Distress</i>	75
4.3.2 Pengaruh ACINDEP terhadap <i>Financial Distress</i>	75
4.3.3 Pengaruh ACMEET terhadap <i>Financial Distress</i>	75
4.3.4 Pengaruh ACCOMP terhadap <i>Financial Distress</i>	75
4.3.5 Pengaruh Kontrol Ukuran (SIZE) Perusahaan terhadap <i>Financial Distress</i>	76
4.4 Pembahasan	76
4.4.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap <i>Financial Distress</i>	76
4.4.2 Pengaruh Komite Audit Independen terhadap <i>Financial Distress</i>	77
4.4.3 Pengaruh Pertemuan Komite Audit Terhadap <i>Financial Distress</i>	79
4.4.4 Pengaruh Kompetensi Komite audit Terhadap <i>Financial Distress</i>	81
BAB V PENUTUP	83
5.1.1 Kesimpulan	83
5.1.2 Keterbatasan dan Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 3.1 Tabel Kriteria Sampel.....	56
Tabel 4.1 Distress	64
Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif	64
Tabel 4.3 Uji Kelayakan Model.....	68
Tabel 4.4 Uji Keseluruhan Model.....	69
Tabel 4.5 <i>Omnibus Test Of Model Coeffisient</i>	70
Tabel 4.6 Koefisien Determinasi	71
Tabel 4.7 Matriks Klasifikasi	72
Tabel 4.8 Uji Multikolinieritas	73
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis.....	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	44

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Hasil Output SPSS	90
Lampiran B Daftar Perusahaan.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Para investor dan kreditur sebelum menanamkan dananya pada suatu perusahaan akan selalu melihat terlebih dahulu kondisi keuangan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, analisis dan prediksi atas kondisi keuangan suatu perusahaan adalah sangat penting (Husnan, 2001). *Financial distress* adalah suatu konsep luas yang terdiri dari beberapa situasi di mana suatu perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan. Istilah umum untuk menggambarkan situasi tersebut adalah kebangkrutan, kegagalan, ketidakmampuan melunasi hutang, dan *default* (Darsono dan Ashari, 2005). *Insolvency* dalam kebangkrutan menunjukkan kekayaan bersih negatif. Ketidakmampuan melunasi utang menunjukkan kinerja negatif dan menunjukkan adanya masalah likuiditas. *Default* berarti suatu perusahaan melanggar perjanjian dengan kreditur dan dapat menyebabkan tindakan hukum (Darsono dan Ashari, 2005).

Menurut Brigham dan Daves (2003), *financial difficulties* terjadi karena serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen serta tidak adanya atau kurangnya upaya mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai keperluan (Fachrudin, 2008). Menurut Platt dan Platt (2002) dalam Atmini (2005), *financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami

oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Kondisi ini pada umumnya ditandai antara lain dengan adanya penundaan pengiriman, kualitas produk yang menurun, dan penundaan pembayaran tagihan dari bank. Apabila kondisi *financial distress* ini diketahui, diharapkan dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut sehingga perusahaan tidak akan masuk pada tahap kesulitan yang lebih berat seperti kebangkrutan ataupun likuidasi.

Kegagalan berbagai perusahaan di seluruh dunia dalam mencapai tujuan yang diharapkan, atau bahkan untuk dapat bertahan dalam dunia usaha, selalu dikaitkan oleh pasar modal internasional, pemakai laporan keuangan, dan profesi akuntansi dengan kelemahan dalam struktur *corporate governance* yang diterapkan perusahaan (Ellomi dan Gueyie, 2001). *Corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstren lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (*Forum Corporate Governance in Indonesia*, 2002). Berbagai skandal kasus korporasi dunia pada perusahaan berskala besar seperti Enron, Xerox, dan WorldCom, mengindikasikan bahwa kegagalan bisnis perusahaan tersebut akibat tata kelola perusahaan yang buruk (Cornett *et al*, 2006).

Menurut Tarmidi (1999), Indonesia pernah mengalami permasalahan *corporate governance* yang menarik perhatian untuk dikaitkan dengan kesulitan

keuangan sejak krisis finansial pada tahun 1997. Banyak para ahli berpendapat kelemahan di dalam *corporate governance* merupakan salah satu sumber utama kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya perekonomian negara-negara di Asia (termasuk Indonesia) pada tahun 1997 dan 1998 (Husnan, 2001).

Menurut Ho dan Wong (2001), bahwa krisis keuangan di Asia tidak hanya disebabkan oleh hilangnya kepercayaan diri dari investor, tetapi juga disebabkan adanya kemunduran *corporate governance* yang efektif. Kasus PT Kimia Farma, Bank Lippo dan PT Indofarma merupakan contoh dari lemahnya penerapan *corporate governance* dalam perusahaan yang ada di Indonesia (Boediono, 2005). Oleh karena itu, *good corporate governance* berguna untuk membenahan pengelolaan korporasi.

Berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik, komite audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal. Bapepam melalui surat edaran No.SE-03/PM/2000 merekomendasikan perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kinerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan. Komite audit lebih lanjut diatur dalam Kep-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki komite audit. Beberapa ketentuan komite audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit
- b. Kep-103/MBU/2002 dan Kep-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit
- c. Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit.

Komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal, serta auditor independen (FCGI, 2002). Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit adalah untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal, memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol, serta melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* yang baik penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan.

Efektivitas kinerja dari sebuah komite audit dapat diukur melalui karakteristik-karakteristik yang dimiliki antara lain ukuran, independensi, aktivitas dari komite audit, dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit. Ukuran komite audit berhubungan dengan jumlah anggota komite audit. Independensi komite audit berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan anggota komite audit dengan aktivitas perusahaan. Aktivitas dari komite audit diwujudkan melalui frekuensi pertemuan komite audit dalam satu tahun.

Sedangkan kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit berhubungan dengan pengetahuan akuntansi, keuangan dan audit serta pengalaman dalam tata kelola perusahaan. Melalui karakteristik komite audit yang baik diharapkan akan memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan kesulitan keuangan.

Menurut Mueller dan Barker (1997), mengidentifikasi komite audit sebagai bagian dari sumbangan strategi kepemimpinan perusahaan untuk keberhasilan upaya perubahan arah perusahaan (Rahmat *et al.*, 2008). Hal ini berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki anggotanya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Simpson dan Gleason (1999), membuktikan komite audit yang kompeten memiliki kapasitas untuk mengurangi kesulitan keuangan suatu perusahaan. Kompetensi yang dimiliki oleh komite audit akan membantu meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, efektivitas komite audit dikaitkan dengan kemakmuran atau kesulitan keuangan perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Rahmat *et al.* (2008), yang menganalisis tentang hubungan karakteristik komite audit (ukuran, komposisi direksi non-eksekutif, frekuensi pertemuan dan keahlian keuangan) pada perusahaan *financial distressed* dan *non-distressed* yang terdaftar di Bursa Malaysia. Penelitian Rahmat *et al.* (2008) menggunakan sampel 73 perusahaan *distressed* dan 73 perusahaan *non-distressed* pada tahun pertama dibentuknya komite audit di Malaysia pada tahun 2000. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari kompetensi komite audit terhadap *financial distress*, sedangkan ukuran komite audit, komite audit

independen, dan frekuensi pertemuan komite audit, tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rahmat *et al.* (2008) adalah penelitian ini dilakukan di Indonesia, penentuan kriteria *financial distress* dengan menggunakan laba negatif dua tahun berturut-turut, dan periode pengamatan dari tahun 2007-2010.

Penelitian Wardhani (2006), menggunakan variabel independen ukuran dewan direksi & dewan komisaris, independensi dewan komisaris, *turn over* direksi, dan struktur kepemilikan. Kriteria *financial distress* didasarkan pada *interest coverage ratio (operating profit/interest expense)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan direktur, *turnover* direksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan keberadaan komisaris independen dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Penelitian Anggarini (2010), menggunakan variabel independen ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, komite audit independen dan kompetensi komite audit. Penelitian ini menggunakan metode ICR untuk mengindikasikan perusahaan yang mengalami *financial distress*. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari kompetensi komite audit terhadap *financial distress*, sedangkan ukuran komite audit, komite audit independen, dan frekuensi pertemuan komite audit, tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Penelitian Khairunnisa (2010), menggunakan variabel independen ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit.

Metode yang digunakan untuk menghitung kemungkinan *financial distress* adalah interest coverage ratio. Pengujian statistik yang dilakukan memberikan hasil bahwa berdasarkan tingkat keyakinan 95% hanya kompetensi komite audit yang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kesulitan keuangan. Berdasarkan tingkat keyakinan 95% ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemungkinan kesulitan keuangan.

Penelitian Wulandari (2010), menggunakan variabel independen ukuran komite audit, komposisi anggota independen komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan kompetensi komite audit terhadap *financial distress*. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan. Hasil analisis menunjukkan hubungan pengaruh yang signifikan antara frekuensi pertemuan komite audit terhadap kesulitan keuangan, sedangkan ukuran komite audit, komposisi anggota independen komite audit, dan kompetensi komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesulitan keuangan.

Hasil penelitian mengenai hubungan karakteristik komite audit terhadap *financial distress* berbeda-beda. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti kembali. Dalam penelitian ini kriteria *financial distress* ditentukan dengan laba bersih negatif dua tahun berturut-turut. Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dengan menggunakan metode yang berbeda akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda pula dan untuk mengetahui pengaruh karakteristik komite audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang disesuaikan dengan

ketentuan regulasi (Baepem). Variabel terikat (*dependent variable*) yang diteliti adalah *financial distress*. Karakteristik komite audit yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran, independensi, frekuensi pertemuan, dan kompetensi anggota komite audit sebagai variabel bebas (*independent variable*). Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sampel perusahaan *financially distressed* yang dibandingkan dengan perusahaan *non financially distressed* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 - 2010. Hal ini dikarenakan data annual report tahun 2006 tidak lengkap, oleh karena itu sampel dimulai dari tahun 2007. Dalam penelitian ini *financially distressed* dikriteria kan sebagai perusahaan yang selama 2 tahun berturut-turut mengalami laba bersih negatif. Dalam penelitian ini menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Fungsi dari variabel kontrol ini agar hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul “PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pada perusahaan ?

2. Apakah proporsi anggota komite audit independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pada perusahaan ?
3. Apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pada perusahaan ?
4. Apakah kompetensi anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pada perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bukti dan menganalisis ukuran komite audit dapat memperbaiki *financial distress* pada perusahaan.
2. Memberikan bukti dan menganalisis komite audit independen dapat memperbaiki *financial distress* pada perusahaan.
3. Memberikan bukti dan menganalisis frekuensi pertemuan komite audit dapat memperbaiki *financial distress* pada perusahaan.
4. Memberikan bukti dan menganalisis kompetensi komite audit dapat memperbaiki *financial distress* pada perusahaan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

- a. Bagi regulator, sebagai wacana pentingnya pengawasan terhadap mekanisme *good corporate governance* oleh komite audit.
- b. Bagi manajemen, sebagai wacana tentang pentingnya peran komite audit untuk menghindari terjadinya *financial distress*.
- c. Bagi kalangan akademisi dan pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian teoritis dan referensi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari analisis data mengenai hubungan antara karakteristik komite audit dengan *financial distress*.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, keterbatasan dan saran-saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (prinsipal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agen). Agen yang bertindak sebagai pengelola dalam suatu perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dengan demikian, agen lebih banyak mempunyai informasi dibandingkan pemilik. Ketimpangan informasi ini biasa disebut sebagai asimetri informasi. Baik pemilik maupun agen diasumsikan mempunyai rasionalisasi ekonomi dan semata-mata mementingkan kepentingannya sendiri (Januarti, 2009), sehingga memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Adanya asimetri informasi ini menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan oleh kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan pengendalian terhadap tindakan-tindakan agen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah :

- a. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
- b. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar

didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), sebuah masalah keagenan yang melekat dalam hubungan prinsipal dan agen dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Biaya ini merupakan biaya pengorbanan agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis biaya yang menjadi komponen biaya keagenan. Pertama, biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk membatasi agen dari kepentingannya. Biaya ini dirancang untuk membatasi aktivitas-aktivitas yang menyimpang yang dilakukan oleh agen. Komponen biaya kedua ialah biaya yang dihabiskan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak sesuatu yang dapat merugikan prinsipal. Contoh biaya ini adalah insentif kepegawaian. Komponen biaya terakhir adalah kerugian residual (*residual loss*) yang merupakan nilai uang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal akibat tindakan agen yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Biaya keagenan merupakan jumlah dari *monitoring cost*, biaya yang dihabiskan oleh agen, dan *residual loss* yang dialami prinsipal.

Biaya keagenan timbul karena adanya upaya pengawasan yang dilakukan oleh prinsipal (pemilik perusahaan) untuk mengatasi masalah perbedaan kepentingan dengan agen (pengelola perusahaan). Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah perbedaan kepentingan adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Pengawasan merupakan salah satu komponen dalam GCG. Kualitas

pengawasan yang baik dapat menurunkan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer sebagai agen.

Salah satu upaya untuk membentuk suatu pengawasan yang baik ialah dengan membentuk komite-komite pengawas untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tahunan dan hal ini dapat membantu pekerjaan Dewan Komisaris yang bertugas menjaga dan memajukan kepentingan para pemegang saham (Alchain dan Demsetz 1972; Fama dan Jensen 1983; dalam Islam *et al.*, 2010).

2.1.2 Financial Distress

Financial distress (kesulitan keuangan) mempunyai banyak arti. Penelitian terdahulu berbeda-beda dalam mengartikan kesulitan keuangan, dimana perbedaan ini tergantung pada cara mengukurnya. Elloumi dan Gueyie (2001), mengkategorikan perusahaan dengan *financial distress* bila selama dua tahun berturut-turut mengalami laba bersih negatif. Classens *et al.* (1999), mendefinisikan perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan sebagai perusahaan yang memiliki *interest coverage ratio* kurang dari satu. Almilia dan Kristijadi (2003), menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* adalah perusahaan yang selama beberapa tahun mengalami laba bersih operasi (*net operation income*) negatif dan selama lebih dari satu tahun tidak melakukan pembayaran deviden. Baldwin dan Scott (1983), menyatakan bahwa suatu perusahaan mengalami *financial distress* apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya dengan dilanggarnya persyaratan utang (*debt covenants*) disertai penghapusan atau pengurangan pembiayaan

deviden. Sedangkan Wruck (1990), menyatakan bahwa perusahaan mengalami *financial distress* sebagai akibat dari permasalahan ekonomi, penurunan kinerja, dan manajemen yang buruk. Dalam penelitian yang terdahulu, untuk melakukan pengujian apakah suatu perusahaan mengalami *financial distress* dapat ditentukan dengan berbagai cara, seperti:

Menurut Lau (1987) dan Hill *et al.* (1996), *financial distress* dilihat dengan adanya pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan pembayaran deviden. Asquith, Gertner dan Scharfstein (1994), melakukan pengukuran *financial distress* menggunakan *interest coverage ratio* untuk mendefinisikan *financial distress*. Hofer (1980) dan Whitaker (1999), mendefinisikan *financial distress* jika tahun perusahaan mengalami laba operasi bersih negatif.

Financial distress dapat membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan pembayaran (*default*), tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Kegagalan pembayaran tersebut, mendorong debitor untuk mencari penyelesaian dengan pihak kreditor, yang pada akhirnya dapat dilakukan restrukturisasi keuangan antara perusahaan, kreditor dan investor (Ross & Westerfield, 1996 dalam Hasymi, 2007). Perusahaan yang mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan) akan menghadapi kondisi a) tidak mampu memenuhi jadwal atau kegagalan pembayaran kembali hutang yang sudah jatuh tempo kepada kreditor. b) perusahaan dalam kondisi tidak *solvable* (*insolvency*).

Menurut Gitman (1994) dalam Hasymi (2007), kesulitan keuangan dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. *Business Failure* (kegagalan bisnis), dapat diartikan sebagai: (1) suatu keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi biaya perusahaan. (2) perusahaan diklasifikasikan sebagai *failure*, perusahaan mengalami kerugian operasional selama beberapa tahun.
2. *Insolvency* (tidak *solvable*), dapat diartikan sebagai: (1) *technical insolvency* timbul apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya pada saat jatuh tempo. (2) *accounting insolvency*, perusahaan memiliki *negative networth*, secara akuntansi memiliki kinerja buruk (*insolvent*), hal ini terjadi apabila nilai buku dari kewajiban perusahaan melebihi nilai buku dari total harta perusahaan tersebut.
3. *Bankruptcy*, yaitu kesulitan keuangan yang mengakibatkan perusahaan memiliki *negative stockholders equity* atau nilai pasiva perusahaan lebih besar dari nilai wajar harta perusahaan.

Menurut Damodaran (1997) dalam Hasymi (2007), kesulitan keuangan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor-faktor penyebab kesulitan keuangan perusahaan, yaitu:

1. Faktor internal kesulitan keuangan

Merupakan faktor dan kondisi yang timbul dari dalam perusahaan yang bersifat mikro ekonomi. Faktor internal dapat berupa:

a. Kesulitan arus kas

Kesulitan arus kas disebabkan oleh tidak imbangnya antara aliran penerimaan uang yang bersumber dari penjualan dengan pengeluaran uang untuk pembelanjaan dan terjadinya kesalahan pengelolaan arus kas (*cash flow*) oleh

manajemen dalam pembiayaan operasional perusahaan sehingga arus kas perusahaan berada pada kondisi defisit.

b. Besarnya jumlah utang

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan melakukan pinjaman pada bank. Saat itu kondisi defisit arus kas dapat teratasi. Namun pada masa yang akan datang akan menimbulkan masalah baru yang berkaitan dengan pembayaran pokok dan bunga pinjaman apabila sumber arus kas dari kegiatan operasional perusahaan tidak dapat menutupi kewajiban pada pihak bank.

Ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengatur penggunaan dana pinjaman akan berakibat terjadinya gagal pembayaran (*default*) yang pada akhirnya timbul penyitaan harta perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan pada bank.

c. Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun

Kerugian dalam kegiatan operasional merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). Situasi ini perlu mendapat perhatian manajemen dengan seksama dan terarah.

2. Faktor eksternal kesulitan keuangan

Faktor eksternal kesulitan keuangan merupakan faktor-faktor diluar perusahaan yang bersifat makro ekonomi yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Faktor eksternal kesulitan keuangan dapat berupa kenaikan tingkat bunga pinjaman.

2.1.3 *Corporate Governance*

Corporate governance telah menjadi pokok bahasan yang penting bagi para pelaku bisnis di seluruh dunia. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan tuntutan persaingan global menjadi salah satu faktor pendorong dilakukannya reformasi GCG (Alijoyo dan Zaini, 2004). *Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI* (2001b) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Nilai tambah yang dimaksud adalah *corporate governance* memberikan perlindungan efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.

Penerapan *corporate governance* memberikan empat manfaat (FCGI, 2001), yaitu: (1) meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*, (2) mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*, (3) mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan (4) pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders's values* dan dividen. Sifat masalah keagenan secara langsung berhubungan dengan struktur

kepemilikan. Struktur kepemilikan yang tersebar tidak akan memberikan insentif kepada pemilik untuk memonitor pengelolaan manajemen. Hal ini disebabkan para pemilik akan menanggung sendiri biaya pengawasan (*monitoring cost*), sehingga semua pemilik akan menikmati manfaat. *Investor* institusi mempunyai peranan dalam menyediakan mekanisme yang dapat dipercaya terhadap penyajian informasi kepada investor. Peranan itu terjadi disebabkan karena *investor* institusi merupakan investor yang *sophisticated*, dan mempunyai daya pengendali yang lebih baik dibanding investor individu. Salah satu prinsip *corporate governance* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) adalah menyangkut peranan dewan komisaris.

Bentuk dewan komisaris tergantung pada sistem hukum yang dianut. Terdapat dua sistem yang berbeda, yaitu *Anglo Saxon* dan Kontinental Eropa (FCGI, 2001a). Dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, sistem yang dianut adalah sistem satu tingkat atau *one tier system*. Pada sistem satu tingkat, perusahaan mempunyai satu dewan direksi yang merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (non direktur eksekutif). Negara-negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat dan Inggris. Sistem hukum Kontinental Eropa menganut sistem dua tingkat atau *two tier system*. Pada sistem dua tingkat, perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan sesuai dengan pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat

diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). Tugas utama dewan komisaris adalah bertanggungjawab mengawasi tugas-tugas manajemen. Indonesia termasuk negara yang mengadopsi sistem dua tingkat ini.

Terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi tingkat efektivitas dewan komisaris, yaitu independensi, kompetensi, dan komitmen. Independensi diharapkan timbul dengan keberadaan komisaris independen. Kompetensi tercipta dengan adanya komite-komite yang dibentuk dewan komisaris, terutama komite audit. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih obyektif dan independen, dan juga untuk menjaga "fairness" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholder* lainnya.

Berdasar surat keputusan Ketua BAPEPAM KEP 41/PM/2003, SK Dir. BEJ Nomor 315/BEJ/06-2000, Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/Tahun 2000, dan Undang-undang BUMN Nomor 19/2003, pembentukan komite audit merupakan suatu keharusan. Komite audit harus diketuai oleh seorang komisaris independen. Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam *corporate governance*. Tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Komite audit beranggotakan komisaris independen (FCGI, 2001). Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor, sehingga komite audit hanya bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Komite audit memiliki tanggungjawab yang besar dalam menyiapkan audit, melakukan

ratifikasi terhadap sistem pengendalian internal, dan memecahkan perselisihan dalam peraturan akuntansi (George, 2003). Iskander dan Chamlou (2000) menyatakan bahwa salah satu elemen *corporategovernance* yang penting adalah transparansi (*transparency*) atau keterbukaan.

2.1.4 Komite Audit

Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-komite dibawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya secara efektif. Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut adalah komite audit, komite kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan *corporate governance* (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Namun, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No:KEP-339/BEJ/2001, yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek hanya komite audit.

Komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Sesuai dengan Keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep.Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa: Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Tugas komite audit erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan dan ketaatan peraturan yang berlaku.

Keberadaan komite audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan *good corporate governance*.

Keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi BEJ No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Pada bagian ini dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) wajib memiliki komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor. Pembentukan komite audit dilakukan dengan dasar UU No.19 tahun 2003 pasal 70, yang dijabarkan lebih lanjut dalam keputusan Bapepam No.29 tahun 2004 pasal 2. Pembentukan tersebut berkaitan dengan *review* sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit.

2.1.4.1 Peran dan Tanggungjawab Komite Audit

Peran komite audit adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan (FCGI, 2002). Komite audit memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

Tanggungjawab komite audit mencakup pada tiga bidang (Surya dan Yustiavandana, 2006) yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggungjawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggungjawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi komite sebagai alat bantu dewan komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun dan hanya sebatas rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris, seperti mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi

khusus. Peran dan tanggung jawab komite audit dituangkan dalam *audit committee charter*.

Audit committee charter atau piagam komite audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen komisaris dan dewan direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perusahaan. Piagam komite audit yang telah disahkan akan menjadi acuan anggota komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam komite audit disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Piagam komite audit akan membantu anggota baru dalam melakukan orientasi sebagai komite audit dan berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk menunjukkan komitmen komisaris dan dewan direksi terhadap efektivitas *corporate governance*, pengendalian internal, *risk assessment*, dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan (FCGI, 2002).

Ada delapan komponen *audit committee charter* yang dipakai sebagai masukan pembuatan *audit committee charter* di BUMN dan perusahaan publik di Indonesia. Delapan komponen tersebut (Alijoyo, 2003 seperti dikutip Putri, 2009) adalah:

1. Tujuan umum dan otoritas komite audit (*overall objectives and authority*)
2. Peran dan tanggungjawab komite audit (*roles and responsibilities*)
3. Fungsi dari pihak-pihak terkait dengan komite audit (*function of respective parties*)
4. Struktur komite audit (*structure*)

5. Syarat-syarat keanggotaan (*membership requirements*)
6. Rapat-rapat komite audit (*meetings*)
7. Pelaporan komite audit (*reporting*)
8. Kinerja komite audit (*performing*)

2.1.4.2 Komite Audit yang Efektif

Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggungjawab, keterbukaan dan objektifitas dewan komisaris dan memiliki fungsi untuk:

1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris
2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan
3. Memungkinkan anggota non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif
4. Membantu direktur keuangan, dengan memberikan suatu kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan
5. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif
6. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen

7. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.

Menurut Dezoort *et al.* (2002), berpendapat bahwa komite audit yang efektif ditentukan dua hal, yaitu sisi input merupakan komposisi kualifikasi, kewenangan dan jumlah sumber daya, serta dari sisi proses yaitu harus memiliki etos kerja yang tinggi (Putra, 2010). Dari input dan proses tersebut diharapkan komite audit dapat bekerja efektif sehingga mampu menghasilkan output berupa laporan keuangan, pengendalian internal dan manajemen risiko yang bisa dipercaya.

2.1.4.3 Struktur Komite Audit

Struktur komite audit di Indonesia diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS).
2. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal ini komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Dalam rekomendasi yang dibentuk oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2002) adalah penting bahwa perusahaan harus

memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite auditnya. Hal ini disebabkan karakteristik komite akan berpengaruh pada peran komite audit dalam pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen.

Adapun persyaratan keanggotaan komite audit sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Bukan merupakan orang dari kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit, atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan dalam enam bulan terakhir.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.

7. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.
8. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi atau pemegang saham utama perusahaan.
9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

2.1.4.4 Karakteristik Komite Audit

Komite Audit mempunyai peran yang cukup vital dalam proses terlaksananya suatu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Tentunya agar Komite Audit dapat menjalankan tugasnya dengan benar dan efektif, maka diperlukan kualifikasi-kualifikasi khusus yang memadai agar maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Wardhani dan Joseph, 2010). Kualifikasi atau karakteristik dari Komite Audit ini diharapkan dapat menjadi suatu dasar kepercayaan terhadap para anggota Komite Audit untuk nantinya dapat bekerja maksimal dan sebaik mungkin.

Karakteristik-karakteristik Komite Audit yang dapat digunakan untuk menilai efektivitasnya, antara lain independensi dan ukuran dari Komite Audit, serta keahlian keuangan dan ketekunan yang dimiliki oleh anggota Komite Audit. Empat karakter ini diidentifikasi oleh Xie *et al.*, (2003). Independensi Komite Audit berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan anggota Komite Audit dengan aktivitas perusahaan. Ukuran Komite Audit berhubungan dengan jumlah anggota Komite Audit. Keahlian keuangan yang dimiliki oleh anggota Komite

Audit berhubungan dengan pengetahuan keuangan dan akuntansi. Sedangkan, ketekunan Komite Audit diwujudkan melalui frekuensi pertemuan Komite Audit dalam satu tahun. Melalui karakteristik Komite Audit yang baik diharapkan akan berpengaruh negatif terhadap *Financial distress*.

2.1.4.5 Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit adalah jumlah seluruh anggota komite audit. Jumlah anggota Komite Audit memiliki kaitan yang erat dengan seberapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi perusahaan. Komite Audit haruslah memiliki jumlah yang memadai untuk mengemban tanggung jawab pengendalian dan pengawasan aktivitas manajemen puncak (Abawayya, 2010). Ukuran komite yang lebih besar menyebabkan adanya pertukaran pengetahuan dan informasi (Tao dan Hutchinson, 2011).

Jumlah anggota Komite Audit disesuaikan besar-kecilnya dengan perusahaan dan tanggung jawab. Menurut Carcello *et al.*, (2008) rantang yang efektif adalah sebesar 6 - 9 orang, karena Komite Audit yang terlalu kecil akan mengalami kesulitan dalam pendistribusian kerja. Namun, biasanya 3 - 5 anggota merupakan jumlah yang cukup ideal (FCGI, 2002; KNKG, 2006). Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004) juga menyatakan bahwa perusahaan *go public* wajib untuk memiliki Komite Audit dengan jumlah minimal tiga orang. Jumlah tersebut mayoritas harus bersifat independen.

2.1.4.6 Komite Audit Independen

Komite audit independen adalah jumlah komite audit yang independen dalam suatu perusahaan. Dalam Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-29/PM/2004 dinyatakan bahwa kedudukan Komite Audit berada di bawah Dewan Komisaris dan salah seorang Komisaris Independen sekaligus menjadi ketua Komite Audit. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan. Anggota Komite Audit dipersyaratkan berasal dari pihak yang tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).

2.1.4.7 Pertemuan Komite Audit

Pertemuan komite audit adalah frekuensi pertemuan komite audit. Dalam setiap *audit committee charter* yang dimiliki oleh masing-masing anggota, komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. Pertemuan secara periodik ini sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu

untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya (FCGI, 2002).

Komite audit juga dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja. Laporan yang dibuat dan disampaikan komite audit kepada komisaris utama adalah:

1. Laporan triwulanan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan bersangkutan.
2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit.
3. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris.

Dalam laporan komite audit kepada dewan komisaris, komite audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengunduran diri, penggantian dan pemberhentian perikatannya, kesimpulan

tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem kontrol internal. Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses *corporate governance*, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*, memonitor bahwa perusahaan patuh pada *code of conduct*, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan atau non-keuangan perusahaan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya (Putra, 2010).

2.1.4.8 Kompetensi Komite Audit

Kompetensi komite audit adalah jumlah anggota komite audit yang berkompeten. Kompetensi Komite Audit adalah karakteristik penting untuk menilai efektivitas operasi dari komite. Dionne dan Triki (2005) mendefinisikan anggota yang berpengetahuan keuangan ialah anggota yang pada saat ini maupun sebelumnya pernah mempunyai posisi atau melakukan aktivitas yang berkaitan dengan keuangan, dan anggota yang mempunyai latar belakang pendidikan keuangan atau akuntansi. Pemahaman tentang akuntansi dan keuangan sangat membantu tugas Komite Audit dalam menguji dan menganalisis informasi keuangan perusahaan. Latar belakang pendidikan merupakan hal penting dalam memastikan bahwa Komite Audit dapat bekerja secara efektif (Rahmat *et al.*, 2009).

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, anggota Komite Audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki di bidang akuntansi atau keuangan. Berdasarkan pedoman *corporate governance* FCGI (2002), anggota Komite Audit harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang akuntansi dan keuangan, serta memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Setidaknya satu anggota Komite Audit harus pula mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menguji tentang karakteristik komite audit dan pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *financial distress* antara lain sebagai berikut: Menurut Elloumi dan Gueyie (2001), meneliti hubungan antara *corporate governance* dengan kemungkinan adanya *financial distress* di perusahaan Australia. Sampeldiambil dari perusahaan yang menerapkan mekanisme *corporate governance* dimana sejumlah 98 perusahaan mengalami *financial distress* dan 97 perusahaantidak mengalami *financial distress*.Data-data tersebut menggunakan periode daritahun 1999-2003. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkatankepemilikan saham oleh direktur dan *audit committee* memiliki hubungan negatifdengan probabilitas *financial distress*. Kemudian praktik *governance* suatu perusahaan berpengaruh terhadap kemungkinan *financial distress*.Selain itu jugaukuran *board* dan kehadiran CEO *duality* dapat menjelaskan status *financial distress* di suatu perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Kristijadi (2003), membentuk 12 persamaan dari 20 rasio keuangan. Penelitian ini memberikan bukti bahwa dari keduabelas persamaan regresi yang dibentuk menunjukkan bahwa rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksikan *financial distress* suatu perusahaan. Karena itu hipotesis dalam penelitian tersebut dapat diterima, bahwa rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksikan kondisi *financial distress* suatu perusahaan. Sedangkan tambahan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel rasio keuangan yang paling dominan dalam menentukan *financial distress* suatu perusahaan adalah: rasio *profit margin* yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan (NI/S), rasio *financial leverage* yaitu hutang lancar dibagi dengan total aktiva (CL/TA), rasio likuiditas yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar (CA/CL), rasio pertumbuhan yaitu rasio pertumbuhan laba bersih dibagi dengan total aktiva (GROWTH NI/TA).

Menurut Almilia dan Meliza (2003), kondisi *financial distress* suatu perusahaan diwakili oleh 3 kelompok perusahaan dan 1 kelompok perusahaan kontrol sebagai pembanding. Keempat kelompok perusahaan tersebut yaitu: Kelompok pertama diwakili oleh perusahaan yang mengalami net income negatif selama 2 tahun berturut-turut; Kelompok kedua diwakili oleh perusahaan yang mengalami *net income* negatif dan nilai buku ekuitas negatif selama 2 tahun berturut-turut.; Kelompok ketiga diwakili oleh perusahaan yang *delisted*; dan Kelompok keempat diwakili oleh perusahaan yang masih tetap aktif serta tidak mengalami *net income* negatif dan nilai buku ekuitas negatif selama 2 tahun berturut-turut. Penelitian yang dilakukan oleh Luciana dan Meliza (2003)

memberikan bukti bahwa rasio *net income/total asset*, *shareholder equity/total assets*, *retained earning/total asset*, dan *total debt/total asset* dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress*.

Menurut penelitian Sharma (2005), menguji hubungan karakteristik komite audit dengan penyajian kembali laporan keuangan pada perusahaan publik di Amerika Serikat yang menyajikan kembali laporan keuangan dan yang tidak menyajikan kembali laporan kembali pada tahun 2001-2002. Karakteristik komite audit yang digunakan adalah keahlian, rapat, reputasi (independensi), masa perikatan komite audit, kompensasi dan *non-audit fee*. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa komite audit dengan karakteristik yang baik berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan perusahaan. Semua karakteristik komite audit yang diukur (keahlian, rapat, independensi, masa perikatan komite audit, dan *fee*) memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan penyajian kembali laporan keuangan. Sedangkan auditor eksternal tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan perusahaan.

Penelitian Wardhani (2006), menguji mekanisme *corporate governance* terhadap *financial distress* pada perusahaan Indonesia. Menggunakan variabel independen ukuran dewan direksi & dewan komisaris, independensi dewan komisaris, *turn over* direksi, dan struktur kepemilikan. Kriteria *financial distress* didasarkan pada *interest coverage ratio (operating profit/interest expense)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan direktur, *turnover* direksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan

keberadaan komisaris independen dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Menurut penelitian Lin *et al.* (2006), meneliti hubungan karakteristik komite audit dengan penyajian laba kembali pada perusahaan publik di Amerika Serikat pada tahun 2000. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen karakteristik komite audit yaitu ukuran komite audit, komite audit independen, keahlian keuangan, aktivitas komite audit dan kepemilikan saham. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran komite audit berhubungan negatif dengan penyajian kembali laba. Sedangkan empat karakteristik komite audit yang lain tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba yang dilaporkan.

Menurut penelitian Almilia (2006), meneliti daya klasifikasi rasio keuangan baik yang berasal dari laporan laba rugi, neraca ataupun laporan arus kas untuk memprediksi kondisi *financial distress* perusahaan dengan tehnik analisis Multinomial Logit. Kelompok perusahaan yang mengalami *financial distress* dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu 1. Perusahaan yang mengalami laba bersih negatif selama 2 tahun berturut-turut, dan 2. Perusahaan yang mengalami laba bersih dan nilai buku ekuitas negatif selama 2 tahun berturut-turut. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pada model pertama yaitu model yang memasukkan rasio keuangan yang berasal dari laporan laba rugi dan neraca menunjukkan bahwa rasio TLTA dapat digunakan untuk memprediksi kondisi *financial distress* perusahaan. Daya klasifikasi total model ini adalah sebesar 79.0%. 2. Pada model kedua yaitu model yang memasukkan rasio keuangan yang berasal dari laporan arus kas menunjukkan bahwa rasio CFFOTA

dan CFFOCL dapat digunakan untuk memprediksi kondisi *financial distress* perusahaan. Daya klasifikasi total model ini adalah sebesar 58.0%. 3. Pada model ketiga yaitu model yang memasukkan rasio keuangan yang berasal dari laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas menunjukkan bahwa rasio CATA, TLTA, NFATA, CFFOCL, CFFOTS dan CFFOTL dapat digunakan untuk memprediksi kondisi *financial distress* perusahaan. Daya klasifikasi total model ini adalah sebesar 79,6%.

Menurut penelitian Rahmat *et al.* (2008), meneliti hubungan karakteristik komite audit dengan *financial distressed*. Sampel yang digunakan terdiri dari 73 sampel perusahaan *distressed* (PN4) dan 73 perusahaan *non-distressed* (non-PN4) yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun pertama pembentukan komite audit di Malaysia tahun 2000. Karakteristik komite audit yang digunakan yaitu ukuran, komposisi direksi non-eksekutif, frekuensi pertemuan dan keahlian keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesulitan keuangan secara signifikan berhubungan dengan keahlian anggota komite audit di bidang keuangan. Ketentuan Bursa Malaysia bahwa komite audit harus memiliki setidaknya satu orang merupakan anggota dari *Malaysian Institute of Accountant* (MIA) dan memiliki pengalaman tidak kurang dari tiga tahun di bidang keuangan, dapat bekerja lebih baik dibandingkan dengan komite audit perusahaan yang kurang pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan. Sedangkan tiga variabel lain yaitu ukuran, komposisi direksi non-eksekutif, dan frekuensi pertemuan dari komite audit tidak ada hubungan yang signifikan terhadap *financial distress*.

Menurut penelitian Anggarini (2010), menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap *financial distress*. Menggunakan variabel independen ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, komite audit independen dan kompetensi komite audit. Penelitian ini menggunakan metode ICR (*Interest Coverage Ratio*) untuk mengindikasikan perusahaan yang mengalami *financial distress*. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari kompetensi komite audit terhadap *financial distress*, sedangkan ukuran komite audit, komite audit independen, dan frekuensi pertemuan komite audit, tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Menurut penelitian Putra (2010), menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap penyajian laba kembali. Menggunakan variabel independen berupa proporsi independen komite audit, frekuensi pertemuan, dan keahlian keuangan komite audit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan dengan karakteristik komite audit yang baik yaitu proporsi independen komite audit, frekuensi pertemuan, dan keahlian keuangan komite audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyajian laba kembali.

Menurut penelitian Khairunnisa (2010), menggunakan variabel independen ukuran komite audit, komite audit independen, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit. Metode yang digunakan untuk menghitung kemungkinan *financial distress* adalah *interest coverage ratio*. Pengujian statistik yang dilakukan memberikan hasil bahwa berdasarkan tingkat keyakinan 95% hanya kompetensi komite audit yang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kesulitan keuangan. Berdasarkan tingkat keyakinan 95%

ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemungkinan kesulitan keuangan.

Penelitian Wulandari (2010), menggunakan variabel independen ukuran komite audit, komposisi anggota independen komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan kompetensi komite audit terhadap *financial distress*. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan. Hasil analisis menunjukkan hubungan pengaruh yang signifikan antara frekuensi pertemuan komite audit terhadap kesulitan keuangan, sedangkan ukuran komite audit, komposisi anggota independen komite audit, dan kompetensi komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesulitan keuangan. Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eloumi dan Gueyie (2001)	<i>Financial distress</i> and Corporate Governance	Variabel dependen: <i>financial distress</i> Variabel independen: <i>board size, board independence, blockdown, duality (variabel dummy), dirown, audit committee, audit opinion</i>	Adanya kepemilikan saham oleh direktur dan adanya <i>audit committee</i> , kehadiran CEO <i>duality</i> dan <i>board</i> kemungkinan <i>financial distress</i>

2.	Almilia dan Kristijadi (2003)	Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi <i>Financial Distress</i> Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta	<i>Financial distress</i> , rasio keuangan	Rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksikan <i>financial distress</i> suatu perusahaan
3.	Almilia dan Meliza (2003)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Perusahaan Pasca IPO dengan Analisis Multinomial Logit	<i>Financial distress</i> , <i>net income/total asset</i> , <i>shareholder equity/total assets</i> , <i>retained earning/total asset</i> , dan <i>total debt/total asset</i>	<i>rationet income/total asset</i> , <i>shareholder equity/total assets</i> , <i>retained earning/total asset</i> , dan <i>total debt/total asset</i> dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas perusahaan yang mengalami kondisi <i>financial distress</i> .
4.	Divest (2005)	The Effect Independent Audit Committee Member Characteristics and Auditor Independence on Financial Restatement	Penyajian kembali laporan keuangan, keahlian, rapat, reputasi (independensi), masa perikatan komite audit, kompensasi dan <i>non-audit fee</i> .	Keahlian, rapat, independensi, masa perikatan komite audit, dan <i>fee</i> berpengaruh signifikan terhadap penyajian kembali laporan keuangan.
5.	Almilia (2006)	Prediksi Kondisi <i>Financial Distress</i> Perusahaan Gopublik Dengan Menggunakan Analisis	<i>Financial distress</i> , rasio-rasio keuangan	Pada model pertama yaitu model yang memasukkan rasio keuangan yang berasal dari laporan laba rugi dan neraca model kedua yaitu model yang memasukkan rasio

		Multinomial Logit		keuangan yang berasal dari laporan arus kas model yang memasukkan rasio keuangan yang berasal dari laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas dapat digunakan untuk memprediksi kondisi <i>financial distress</i> perusahaan.
6.	Wardhani (2006)	Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially Distressed Firms)	<i>Financial distress</i> , ukuran dewan direksi dan dewan komisaris, independensi dewan komisaris, <i>turn over</i> direksi, struktur kepemilikan, <i>log total asset</i> , dan <i>dummy year</i> .	Ukuran dewan direktor, <i>turn over</i> direksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>financial distressed</i> , sedangkan independensi dewan komisaris dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>financial distress</i> .
7.	Lin dan Yang (2006)	The Effect of audit committee performance on earnings quality	Penyajian kembali laba, ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan, aktivitas, dan kepemilikan saham.	Ukuran komite audit berhubungan negatif dengan penyajian laba kembali. Sedangkan independensi, keahlian keuangan, aktivitas komite audit dan kepemilikan saham tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyajian laba kembali.
8.	Rahmat, <i>et al</i> (2008)	Audit Committee Characteristic in Financially Distressed and	<i>Financial distressed</i> , ukuran komite audit, proporsi direksi non-	Keahlian keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap

		Non-distressed Companies	eksekutif, frekuensi pertemuan, keahlian keuangan.	<i>financial distressed</i> . Sedangkan ukuran, proporsi direksi non-eksekutif, dan frekuensi pertemuan Komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>financial distressed</i> .
9.	Anggarini (2010)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap <i>Financial Distress</i>	<i>Financial Distress</i> , ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, komite audit independen dan kompetensi komite audit.	kompetensi komite audit signifikan terhadap <i>financial distress</i> , sedangkan ukuran komite audit, komite audit independen, dan frekuensi pertemuan komite audit, tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> .
10.	Putra (2010)	Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Penyajian Laba Kembali	Penyajian Laba Kembali, proporsi independen komite audit, frekuensi pertemuan, dan keahlian keuangan komite audit.	Proporsi independen komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan keahlian keuangan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penyajian laba kembali.
11.	Khairunnisa (2010)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap <i>Financial distress</i>	<i>Financial Distress</i> , ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, komite audit independen dan kompetensi komite audit.	Berdasarkan tingkat keyakinan 95% hanya kompetensi komite audit yang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kesulitan keuangan. Berdasarkan tingkat keyakinan 95% ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh negatif

				secara signifikan terhadap kemungkinan kesulitan keuangan.
12.	Wulandari (2010)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap <i>Finansial distress</i>	ukuran komite audit, komposisi anggota independen komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan kompetensi komite audit terhadap <i>financial distress</i> , ukuran perusahaan	hubungan pengaruh yang signifikan antara frekuensi pertemuan komite audit terhadap kesulitan keuangan, sedangkan ukuran komite audit, komposisi anggota independen komite audit, dan kompetensi komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesulitan keuangan

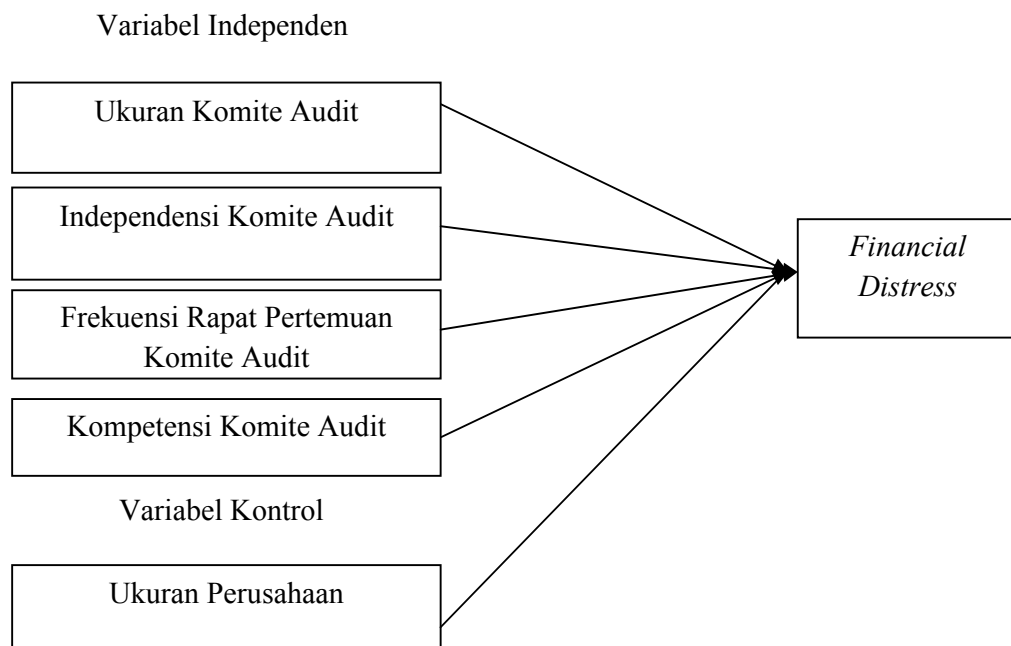
2.3 Kerangka Pemikiran

Meningkatnya perhatian atas banyaknya kasus kesulitan keuangan maupun kegagalan perusahaan akibat lemahnya *corporate governance* yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar menjadikan efektivitas kinerja komite audit sebagai sebuah objek penelitian yang menarik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik komite audit terhadap *financial distress*. Karakteristik komite audit diteliti dengan membandingkan karakteristik komite audit pada perusahaan *financial distressed* dan perusahaan *non financial distressed*.

Dalam penelitian ini, karakteristik komite audit yang digunakan yaitu ukuran komite audit, komite audit independen, frekuensi pertemuan komite audit dan kompetensi komite audit. Keempat karakteristik tersebut adalah faktor penentu efektivitas kinerja mereka yang memiliki pengaruh terhadap *financial distress*. Untuk memberikan gambaran tentang hubungan negatif tersebut, dibuat sebuah bagan yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian yang

diturunkan dari hipotesis. Gambar yang menunjukkan hubungan antar variabel ditunjukkan dalam gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis memperlihatkan hubungan tertentu antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

2.4.1 Ukuran Komite Audit dan *Financial Distress*

Sesuai dengan teori keagenan, kualitas pengawasan yang baik dapat menurunkan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer sebagai agen. Dalam rangka untuk membuat komite audit yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan pengelolaan perusahaan, komite harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggungjawab. Di Indonesia, pedoman pembentukan komite audit yang efektif (KNKG, 2002) menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Jumlah anggota komite audit yang harus lebih dari satu orang ini dimaksudkan agar komite audit dapat mengadakan pertemuan dan bertukar pendapat satu sama lain. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda-beda.

Menurut Pierce dan Zahra (1992) dalam teori ketergantungan sumber daya berargumen bahwa terciptanya fungsi pengawasan komite audit yang efektif berhubungan dengan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh komite. Efektivitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan komite audit yang efektif dapat mengubah kebijakan yang berbeda dalam pencapaian laba akuntansi pada beberapa tahun ke depan sehingga perusahaan dapat menghindari

terjadinya permasalahan keuangan (Rahmat *et al.*,2008). Berdasarkan argumen diatas, dapat dirumuskan hipotesis.Semakin banyak jumlah anggota komite audit, maka semakin kecil *financial distress* terjadi dalam sebuah perusahaan.

H1. Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

2.4.2 Komite Audit Independen dan *Financial Distress*

Menurut teori keagenan, anggota independen merupakan pengawas yang dapat menurunkan asimetri informasi dan menjembatani kepentingan antara pemilik dan manajemen.Anggota independen dapat dikatakan sebagai pengawas yang baik karena dianggap lebih objektif dan kritis dalam hubungannya dengan kebijakan yang dibuat oleh manajemen.Di samping itu, anggota independen memiliki kepentingan untuk meningkatkan reputasi sebagai pengawas yang baik. Oleh karena itu, anggota independen akan mengurangi terjadinya *financial distress*. Peraturan BEI dan ketentuan pedoman *corporate governance* dalam pembentukan komite audit yang efektif menyatakan bahwa komite audit terdiri tidak kurang dari tiga anggota yang mayoritas independen, yaitu sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan. Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak ekstern perusahaan yang independen, harus terdiri dari individu-individu yang independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Independensi ini bertujuan untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena

individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).

Hasil beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh positif atas komposisi anggota komite yang di dominasi oleh pihak-pihak independen terhadap kinerja komite audit. Seperti penelitian McMullen dan Raghunandan (1996), yang membuktikan bahwa direktur non-eksekutif akan mengurangi kemungkinan manipulasi laporan keuangan (Rahmat *et al.*, 2008).

Kehadiran anggota yang independen sebagai mayoritas anggota komite audit akan meningkatkan independensi komite dan akan mengoptimalkan reputasi komite audit sebagai monitor yang baik, karena anggota yang independen mampu memberikan opini yang independen, lebih objektif dan lebih mampu menawarkan kritik dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajemen (Porter dan Gendall, 1993) dalam Rahmat *et al* (2008). Diperkirakan bahwa dengan adanya komite audit independen maka akan menambah kepercayaan investor terhadap laporan keuangan dan akan mengurangi kemungkinan perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan karena sebuah kasus penyimpangan tata kelola perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis. Semakin banyak jumlah anggota komite audit yang independen, maka semakin kecil *financial distress* terjadi dalam sebuah perusahaan.

H2. Komite audit Independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

2.3.3 Frekuensi Pertemuan Komite Audit dan *Financial Distress*

Sesuai dengan teori keagenan, pengawasan merupakan salah satu komponen dalam GCG. Kualitas pengawasan yang baik dapat menurunkan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer sebagai agen. Efektivitas komite audit dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal memerlukan pertemuan rutin. Pertemuan yang teratur dan terkendali dengan baik akan membantu komite audit dalam memeriksa akuntansi berkaitan dengan sistem pengendalian internal, dan dalam hal menjaga informasi manajemen (McMullen dan Raghunandan, 1996) dalam Rahmat *et al.* (2008). *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* mewajibkan komite audit untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun. Frekuensi pertemuan tersebut harus jelas terstruktur dan dikontrol dengan baik oleh ketua komite.

Collier dan Gregory (1999), mengungkapkan bahwa komite audit yang menyelenggarakan frekuensi pertemuan yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif, meliputi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan McMullen dan Raghunandan (1996), yang membuktikan bahwa komite audit perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tidak mengadakan pertemuan sesering perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan (Rahmat *et al.*, 2008). Dengan melakukan pertemuan secara periodik, komite audit dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan oleh manajemen

karena aktivitas pengendalian internal perusahaan dilakukan secara terus menerus dan terstruktur sehingga setiap permasalahan dapat cepat terdeteksi dan diselesaikan dengan baik oleh manajemen. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis. Semakin sering frekuensi pertemuan komite audit, maka semakin kecil *financial distress* terjadi dalam sebuah perusahaan.

H3. Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

2.4.4 Kompetensi Komite Audit dan *Financial Distress*

Sesuai dengan teori keagenan, untuk dapat menurunkan asimetri informasi dan menjembatani kepentingan pemilik dan manajemen, Komite Audit harus memiliki kemampuan yang memadai untuk meningkatkan efektivitasnya. Keahlian keuangan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh Komite Audit yang disyaratkan oleh BAPEPAM. Pengetahuan dalam akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Latar belakang pendidikan menjadi ciri penting untuk memastikan komite audit melaksanakan peran mereka secara efektif. Anggota komite audit yang menguasai keuangan akan lebih profesional dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi (Hambrick dan Mason, 1984 dalam Rahmat *et al.*, 2008). *Fraud* manajemen dan penyimpangan pengawasan internal juga akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Beberapa pelacakan *fraud* tertentu tergantung pada pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh komite audit. Menurut Dezoort *et al.* (2002) dalam (Putra, 2010), menyatakan bahwa kompetensi komite audit akan meningkatkan

sebuah salah saji material yang ditemukan akan dikomunikasikan dan dikoreksi secepatnya.

Komite audit dengan anggota yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif. Keberadaan personal yang memenuhi syarat sebagai anggota komite audit diharapkan dapat mengadopsi standar akuntabilitas dan tingkat prestasi yang tinggi, dapat menyediakan bantuan dalam peran mengontrol dan pengawasan, dan berusaha keras untuk citra dan kinerja perusahaan yang lebih baik sehingga komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian McMullen dan Raghunandan (1996) dalam (Hidayati, 2000) yang membuktikan bahwa komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis. Semakin banyak anggota komite audit yang berkompeten, maka semakin kecil *financial distress* terjadi dalam sebuah perusahaan.

H4. Kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan variabel-variabel untuk melakukan analisis data. Variabel tersebut terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*) variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel kontrol. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *financial distress*. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, komite audit independen, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit. Sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan.

3.1.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang terikat dan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Melalui analisis terhadap variabel terikat adalah mungkin untuk menemukan jawaban atas suatu masalah (Sekaran, 2006). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *financial distress* atau permasalahan yang terjadi pada perusahaan.

Penelitian ini mendefinisikan perusahaan yang mengalami *financial distress* mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Elloumi dan Gueyie (2001), mengkategorikan perusahaan dengan *financial distress* bila selama dua tahun berturut-turut mengalami laba bersih negatif.

3.1.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

3.1.2.1 Ukuran Komite Audit

Berdasarkan Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 menyatakan bahwa komite audit pada perusahaan publik Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota dan diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen. Variabel ukuran komite audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota di dalam komite audit.

3.1.2.2 Komite Audit Independen

Independensi dimaksudkan untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan. Independensi komite audit pada penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota komite audit yang independen terhadap jumlah seluruh anggota komite audit. Independensi Komite Audit (ACINDP) diperoleh dari perhitungan :

$$\text{ACINDP} = \frac{\text{Jumlah anggota-anggota independen}}{\text{Jumlah anggota komite audit}} \quad (3.1)$$

3.1.2.3 Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Berdasarkan pedoman FCGI (2002), menyatakan bahwa komite audit harus mengadakan pertemuan paling sedikit setiap tiga bulan atau minimal empat kali pertemuan dalam satu tahun. Variabel frekuensi pertemuan komite audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah pertemuan komite audit dalam 1 tahun.

3.1.2.4 Kompetensi Komite Audit

Kompetensi komite audit diukur berdasarkan latar belakang pendidikan keuangan dan pengalaman kerja yang dimiliki. Pengukuran latar belakang pendidikan berdasarkan Keputusan Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yang menyebutkan bahwa minimal salah seorang dari anggota komite audit adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Latar belakang pendidikan dapat berasal dari lulusan fakultas ekonomi bergelar sarjana muda, sarjana, magister, dan doktor dari Universitas dalam negeri maupun luar negeri atau pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan non-formal yang berkaitan dengan kompetensi keuangan dan administrasi bisnis.

Sedangkan pengukuran pengalaman komite audit berdasarkan pedoman FCGI (2002), yang menyatakan paling sedikit satu orang anggota komite audit merupakan profesional yang memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnisnya, memiliki pemahaman mengenai risiko dan kontrol, serta mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan. Pengalaman di bidang keuangan dapat dilihat pada profil anggota komite audit yang sedang atau pernah bekerja dalam bidang audit, perbankan, *finance*, menjadi akademisi akuntansi pada universitas dalam negeri atau luar negeri, dan menjabat sebagai anggota komite audit maupun *internal control* pada perusahaan lain. Kompetensi komite audit dalam penelitian ini diukur dengan:

$$\text{ACCOMP: } \frac{\text{Jumlah anggota yang berkompeten}}{\text{Jumlah anggota komite audit}} \quad (3.2)$$

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang variabelnya dikontrol oleh peneliti untuk menetralsir pengaruhnya. Jika tidak dikontrol variabel tersebut akan mempengaruhi gejala yang sedang dikaji (Sarwono, 2006).

Penelitian ini menggunakan satu variabel kontrol untuk mengontrol faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kondisi *financial distress*. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan.

3.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan tolak ukur yang menentukan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya perusahaan berbeda-beda dalam hal mengukurnya. Ukuran tersebut bisa dilihat dari total penjualan, total *assets*, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva (Sembiring, 2008 dalam Adityawati, 2011).

Menurut Moulton dan Thomas (dalam Donker, dkk 2009) perusahaan yang besar memiliki kredibilitas yang lebih besar dalam pasar keuangan. Mereka berpendapat bahwa perusahaan besar memiliki kesempatan yang lebih baik dalam hal menata kembali perusahaannya dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Selain itu juga perusahaan besar memiliki posisi yang lebih baik dalam mempertahankan penjualan asetnya demi memberikan sumber daya yang baru bagi aktivitas operasi di perusahaan tersebut. Perusahaan besar cenderung memiliki level yang rendah terhadap kegagalan daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar biasanya mendapat pinjaman dari pihak lain yang menjadi alasan perusahaan tersebut dapat bertahan lebih lama. Oleh karena itu

dalam penelitian ini, ukuran perusahaan berperan sebagai variabel kontrol untuk variabel lainnya.

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan total aset pada akhir tahun. Jumlah aset lebih menunjukkan ukuran perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan diharapkan semakin mempunyai kemampuan dalam melunasi kewajiban di masa depan, sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan (Storey 1994 dalam Fachrudin, 2008). Untuk mendapatkan hasil total aset yang lebih baik dan valid, maka langkah untuk mengatasinya adalah melakukan transformasi data mentah menjadi data yang merupakan nilai logaritma dari data itu sendiri (\ln total aset).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 - 2010. Perusahaan publik dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan data secara keseluruhan sehingga bisa menggambarkan fenomena keadaan yang sebenarnya. Tahun penelitian yang dipilih adalah tahun 2007-2010. Dasar pemilihan tahun penelitian ini adalah karena data *annual report* tahun 2006 tidak lengkap, oleh karena itu sampel dimulai dari tahun 2007-2010. Periode penelitian hanya sampai tahun 2010 karena belum semua perusahaan publik yang terdapat di Bursa Efek Indonesia mengeluarkan *annual report* 2011.

Sampel yang diambil dari pasangan perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan dengan perusahaan yang sehat secara

keuangan. Penentuan sampel akan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 - 2010.
- b. Perusahaan publik yang pernah mengalami laba bersih negatif sekurang-kurangnya 1 tahun.
- c. Perusahaan yang memiliki data laporan komite audit yang lengkap. Apabila tidak lengkap maka dikeluarkan dari sampel.
- d. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah.

Tabel 3.1 kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007	451
Perusahaan publik yang tidak pernah mengalami laba bersih negatif sekurang-kurangnya 1 tahun.	(316)
Perusahaan yang memiliki data laporan komite audit yang tidak lengkap.	(68)
Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tidak dalam bentuk rupiah.	(29)
Total Sampel Perusahaan 2007	38

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel tersebut, maka diperoleh data sebanyak 38 perusahaan. Dengan menggunakan metode penggabungan data selama pengamatan 4 tahun tersebut diperoleh sebanyak 38×4 periode atau diperoleh

sebanyak 152 data amatan. Selanjutnya sejumlah data tersebut digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data keuangan untuk melihat apakah ada laba negatif, diambil dari laporan keuangan auditan perusahaan tahun 2007-2010, dan ICMD tahun 2007-2011.
2. Data untuk melihat karakteristik komite audit (ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit) diperoleh dari laporan tahunan perusahaan (*annual report*) tahun 2007-2010.
3. Data yang berhubungan dengan variabel kontrol diperoleh dari laporan keuangan auditan perusahaan tahun 2007-2010, dan ICMD tahun 2007-2011.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini dengan data dokumentasi. Pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku, koran, majalah dan sebagainya (*purposive sampling*)

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan dibandingkan dengan yang sehat secara keuangan.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai *mean* atau rata-rata, standar deviasi, *maximum* atau nilai tertinggi pada data dan *minimum* atau nilai terendah pada data (Ghozali, 2005). Statistik deskriptif digunakan menggambarkan variabel ukuran komite audit, komite audit independen, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit.

3.5.2 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji seluruh hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi logistik (*regression logistic*) yang variabel bebasnya merupakan kombinasi antara variabel kontinyu (data metrik) dan kategorial (data non metrik). Campuran skala pada variabel bebas tersebut menyebabkan asumsi *multivariate normal distribution* tidak dapat terpenuhi, dengan demikian bentuk fungsinya menjadi logistik. Teknik analisis ini tidak memerlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2005).

Model logit digunakan untuk melihat hubungan kemungkinan perusahaan akan mengalami kondisi kesulitan keuangan pada suatu periode dengan karakteristik komite audit pada periode yang sama. Variabel terikat yang digunakan merupakan variabel binary, yaitu apakah perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan atau tidak. Variabel bebas yang digunakan dalam model ini adalah ukuran komite audit, komite audit independen, frekuensi

pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit. Perhitungan statistik dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi logistik dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS.

Persamaan yang dibentuk adalah sebagai berikut :

$$\text{DISTRESS} = \beta_0 + \beta_1 \text{ACSIZE}_i + \beta_2 \% \text{ACINDP}_i + \beta_3 \text{ACMEET}_i + \beta_4 \text{ACCOMP}_i + \beta_5 \text{SIZE}_i + \varepsilon_i \quad (3.3)$$

Dimana:

DISTRESSED = Nilai 1 (satu) untuk perusahaan *financial distressed* dan
 β_0 = nilai 0 (nol) perusahaan non *financial distressed*.

ACSIZE = *Audit committee size* atau jumlah seluruh anggota komite

ACINDP = *Independence of audit committee* atau proporsi anggota yang independen di dalam komite audit terhadap jumlah seluruh anggota komite audit

ACMEET = *Frequency of audit committee meeting* atau jumlah seluruh pertemuan/rapat dalam satu tahun

ACCOMP = *Competence of audit committee* atau jumlah komite audit yang berkompeten terhadap jumlah seluruh anggota komite audit.

SIZE = Ukuran perusahaan.

ε_i = *Disturbance error*

Pada model regresi logistik, terdapat kondisi yang perlu diperhatikan dari output model tersebut. Kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Menurut Ghozali (2005), *goodness of fit test* dapat dilakukan dengan memperhatikan *output* dari *Hosmer and Lemeshow's Goodness of fit test*, dengan hipotesis:

H0 : Model yang dihipotesiskan *fit* dengan data

HA : Model yang dihipotesiskan tidak *fit* dengan data

Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *goodness fit model* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik

Hosmer and Lemeshow lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol diterima dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model diterima karena sesuai dengan data observasinya.

2. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Dalam menilai *overall fit model*, dapat dilakukan dengan beberapa cara.

Diantaranya:

a. *Chi Square* (χ^2)

Tes statistik *chi square* (χ^2) digunakan berdasarkan pada fungsi *likelihood* pada estimasi model regresi. *Likelihood* (L) dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. L ditransformasikan menjadi $-2\log L$ untuk menguji hipotesis nol dan alternatif. Penggunaan nilai untuk keseluruhan model terhadap data dilakukan dengan membandingkan nilai $-2 \log likelihood$ awal (hasil *block number* 0) dengan nilai $-2 \log likelihood$ hasil *block number* 1. Dengan kata lain, nilai *chi square* didapat dari nilai $-2\log L_1 - 2\log L_0$.

Apabila terjadi penurunan, maka model tersebut menunjukkan model regresi yang baik. $2\chi^2\chi$

b. *Cox and Snell's R Square* dan *Nagelkerke's R square*

Cox dan Snell's R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran *R square* pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan. Untuk mendapatkan koefisien determinasi yang dapat diinterpretasikan seperti nilai R^2 pada *multiple regression*, maka digunakan *Nagelkerke R square*. *Nagelkerke R square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell R square* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai *Cox and Snell R square* dengan nilai maksimumnya (Ghozali, 2005).

c. Tabel Klasifikasi 2x2

Tabel klasifikasi 2x2 menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen dalam hal ini *financial distress* (1) dan *non financial distress* (0), sedangkan pada baris menunjukkan menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen. Pada model sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 2005).

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebasnya. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebasnya. Menurut Ghozali (2005), jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi yang umumnya di atas 0,95, maka ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.

4. Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan berada pada kondisi *financial distress*. Koefisien regresi logistik dapat ditentukan dengan menggunakan *p-value* (*probability value*).

- a. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5% (0,05).
- b. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi *p-value*. Jika *p-value* (signifikan) $> \alpha$, maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika *p-value* $< \alpha$, maka hipotesis alternatif diterima.